

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990).

Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Alumni, 1997), hlm.47

....., Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992).

Dedeh Maryani dan Nainggolan Ruth Roselin E, Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

I Gede Pantja Astawa, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2013).

Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Indrati, Maria Farida, Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampessy, Ilmu Perundang-Undangan, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka).

Kansil C.S.T, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2007).

Muh. Hasrul, Kekuasaan Gubernur di Daerah, (Yogyakarta: Mahakarya Renggang Offset, 2015).

Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1998).

Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005).

Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, (Yogyakarta: Penerbit Liberty), 1981.

Jurnal

Ago Muh. Syahrul, Ruslan Renggong, dan Almusawir, “Pengaruh Pelaksanaan Kewenangan Fasilitasi Gubernur Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Atau Kota”, Jurnal Administrasi Paradigma Negara, Vol. 3, No. 2, 2021.

Hutabalian, Sri Magdalena, “Peran Biro Hukum Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Studi di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah)” JISPAR : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintahan, Vol. 5, No. 1, 2016.

Resmita, Yuan Sasi, “Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal, No. D 101 10419, 2017.

Suhardono, Muhammad, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, 2014.

Syihabudin, “Kajian Terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal Hukum, No. 23, Vol. 10, 2003.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Daerah.

Wawancara

Arjuni, Lusi, Wawancara, Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, (Semarang: 17 Juni 2022).

Bahan Lain

<http://kbbi.co.id/arti-kata/stabil>

<http://kbbi.co.id/arti-kata/fungsi>